

PERAN SUMBERDAYA ALAM DALAM KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI ACEH

Abstract

Poverty has become one of the main issues hindering the regional development in Aceh Province. Studies has shown that there are positive relationship between natural resources and regional revenue. This research uses descriptive-quantitative analysis and indicates that although poverty factors, such as the average years of schooling in Aceh, have exceeded the national average, the income generated from natural resources and access to capital for the community are still considered low, contributing to low income levels and high poverty in the province. Meanwhile, the role of natural resources in development and poverty alleviation can be assessed through the province's Revenue-Sharing Fund in Natural Resources (DBH SDA), which remains low and is lower compared to other provinces in Sumatra. The average DBH SDA in Aceh for the year 2018-2022 is around 65.73 percent of the total DBH. Yet, the actual DBH SDA is largely proportioned by the Revenue-Sharing Fund obtained from the Special Autonomy scheme for Oil and Gas, which accounts for 88.53 percent from the total DBH. Furthermore, the role of natural resources in poverty reduction and regional development is not only challenged by the suboptimal income but also by the government's incompetence to generate effective, efficient, and synergistic regional budgeting and planning.

Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB USK
Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia - 23111
Telp/Fax: (0651) 7551265
Email: ekapi.ekp@feb.usk.ac.id

©2024 FEB USK. All rights reserved.

Anita Faiziah¹

Univeristas Syiah Kuala
E-mail: anita.faiziah@usk.ac.id

Aliasuddin 2

Univeristas Syiah Kuala
E-mail: aliasuddin@usk.ac.id

Nur Aidar 3

Univeristas Syiah Kuala
E-mail: nuraidar@usk.ac.id

Diana Sapha A.H 4

Univeristas Syiah Kuala
E-mail: diana.sapha@usk.ac.id

Putri Bintusy Syathi 5

Univeristas Syiah Kuala
E-mail: putri_syathi@usk.ac.id

Sri Sukma Wahyuni 6

Univeristas Syiah Kuala
E-mail: sri.sukma@usk.ac.id

Keywords:

Natural Resource Revenue, Poverty,
Regional Development

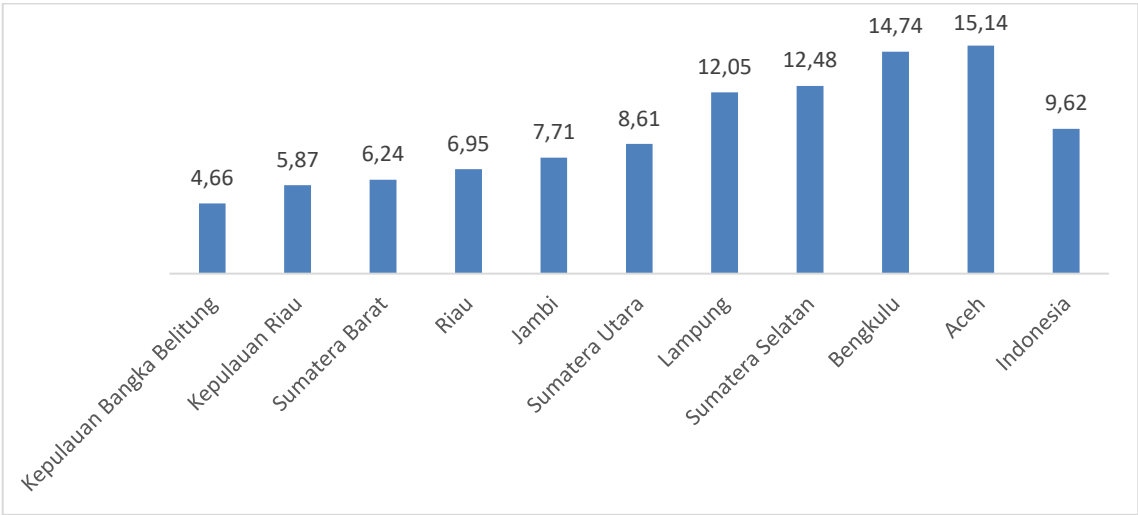
INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 31 Juli 2024
Diterima setelah revisi: 13 Agustus 2024
Diterima: 2 Oktober 2024
Dipublikasi: November 2024

¹ Anita Faiziah (*) adalah corresponding author

1. Pendahuluan

Pengentasan kemiskinan telah menjadi tantangan utama dalam pembangunan wilayah di Provinsi Aceh. Tingginya rentang kemiskinan pada suatu daerah mencerminkan adanya permasalahan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah yang perlu dibenahi. Penduduk miskin di Provinsi Aceh menurut BPS (2023a) berdasarkan jumlahnya, masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Sumatera. Akan tetapi, jika melihat secara presentase, rata-rata penduduk miskin di Provinsi Aceh selama tahun 2018-2023 mencapai 15.14 persen dan menduduki sebagai provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera, serta masih berada diatas rata-rata kemiskinan nasional, yaitu 9,62 persen (Gambar 1). Dengan demikian, tingginya jumlah penduduk miskin Aceh yang belum sejahtera mengindikasikan pembangunan perekonomian provinsi tersebut masih menghadapi tantangan yang berat.



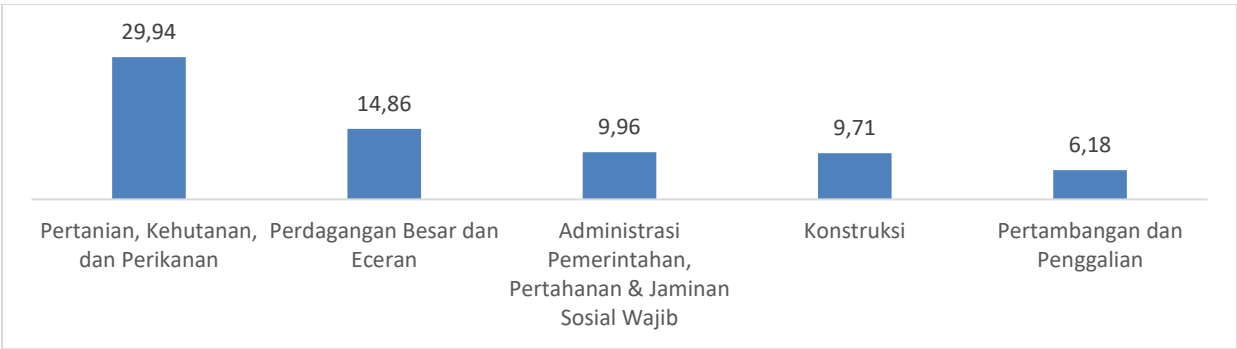
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Sumatera (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2018 - 2023, diolah

Kemiskinan dan pembangunan daerah juga memiliki kaitan yang erat. Pembangunan sejatinya merupakan proses multi-dimensi dan proses yang melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial dan sikap masyarakat, serta lembaga nasional yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan pengangguran, serta penanggulangan kemiskinan (Todaro & Smith, 2012). Sebaran penduduk miskin di Indonesia secara mayoritas berada pada daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, sehingga pembangunan daerah di Indonesia perlu difokuskan pada daerah pedesaan. Pembangunan desa berdasarkan Farida, dkk (2022) melalui yang meliputi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Adanya pelayanan desa yang didukung oleh kondisi infrastruktur dan aksesibilitas

pelayanan umum akan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Selain itu, pembangunan daerah juga dapat diupayakan dengan mengalokasikan APBD dalam Dana Desa dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan daerah maupun manusia di suatu daerah dapat terdorong (Sembiring,2020).

Dalam hal meningkatkan pembangunan, kekayaan Sumber Daya Alam merupakan salah satu faktor produksi yang dapat diandalkan dalam mempercepat perekonomian dan pendapatan daerah, serta pembangunan daerah tersebut. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan pada perekonomian berdasarkan studi empiris dapat meningkatkan penerimaan daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah pada postur APBD. Menurut Juliansyah (2018), PDRB memiliki hubungan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Simeulue. Artinya, semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingaa penerimaan PAD juga mengalami peningkatan. Bargawa dan Wibowo (2018) juga melakukan penelitian bahwa terdapat kontribusi pendapatan regional hijau dari industri pertambangan mineral terhadap pendapatan regional.

Provinsi Aceh memiliki sumberdaya alam yang terdiri dari sumberdaya pertanian, perikanan, minyak dan gas bumi serta pertambangan. Hal ini dibuktikan dari kontribusi sektor sumberdaya alam yang menjadi yang menjadi 5 kontributor utama dalam perekonomian Aceh selama ini. Berdasarkan data PDRB ADHB tahun 2018 hingga 2022, kontributor utama perekonomian Aceh didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan sebesar 29,94 persen, disusul sektor pertambangan menjadi sektor ke lima tertinggi sebanyak 6,18 persen (Gambar 2).



Gambar 2. Rata-rata Kontribusi PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2018-2022, diolah

Sementara itu, untuk mendukung upaya pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, pemerintah perlu mengukur efektivitas pendapatan daerah yang diterima berdasarkan sumbernya dalam program pembangunan yang dijalankan. Dalam penelitiannya, Varicela (2021)

menambahkan bahwa efektivitas dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dan PAD berkaitan dengan perekonomian daerah. Penelitian serupa juga pernah dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan mengungkapkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan yang dihasilkan oleh postur PAD yaitu, DBH, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi (Mokorowu, 2020). Namun demikian, efek sumberdaya alam pada performa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas institusi pemerintahan pada jangka panjang (Ji et al, 2014). Salah satu tantangan negara berkembang dalam mengelola pendapatan yang dihasilkan yaitu bagaimana pemanfaatan sektor sumberdaya alam untuk dapat diinvestasikan dalam investasi sumberdaya manusia dan modal manusia untuk meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan. (Gylfason, 2001; Goorha, 2006; OECD, 2011 dalam Singh, dkk, 2023).

Dengan demikian, uraian diatas menjelaskan bahwa sektor sumber daya alam (SDA) memiliki potensi yang kuat dalam meningkatkan kegiatan perekonomian dan pendapatan daerah. Potensi tersebut juga diharapkan sebagai tombak pembangunan suatu daerah dan meminimalisir permasalahan kemiskinan. Namun demikian, efektivitas dari kontribusi tersebut perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan oleh pemerintah, sehingga perlu dilakukan penelitian yang mengkaji untuk melihat sejauh mana kesempatan tersebut dapat diutilisasi oleh pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Sumber Daya Alam dalam Pembangunan dan Kemiskinan di Provinsi Aceh dalam periode 2018-2022 melalui distribusi penerimaan DBH SDA. Penelitian ini akan mengurai karakteristik dan penyebab utama kemiskinan, peran penerimaan DBH SDA terhadap pendapatan dan peran penerimaan DBH SDA terhadap pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh.

2. Tinjauan Teoritis

Kemiskinan

Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam hal ekonomi yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan pokok baik pangan, sandang dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini berdampak pula pada ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup seperti kesempatan kesehatan dan pendidikan yang layak. Menurut Suwadi (2014), kemiskinan juga disebabkan dapat timbul oleh sifat alami dari perilaku masyarakat yang memiliki keterbatasan dari segi modal Sumber Daya Manusia (SDM) dan akses lokasi masyarakat berada,

serta kebijakan pembangunan atau pemerintah yang belum merata. Sementara itu menurut Arsyad (2010), disamping dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan pendapatan, kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikan atas faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat, dan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan.

Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan lebih rinci menurut Kuncoro (2006) antara lain;

- a. Secara mikro, kemiskinan disebabkan oleh adanya ketimpangan kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk yang miskin cenderung memiliki sumberdaya alam yang berkualitas rendah dan berjumlah sedikit.
- b. Kemiskinan dipengaruhi oleh kualitas SDM yang rendah yang menyebabkan rendahnya produktivitas individu tersebut sehingga berdampak pada rendahnya upah dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Faktor pengaruh kualitas SDM antara lain; pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, diskriminasi atau faktor keturunan.
- c. Secara singkat, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses modal.

Pembangunan Daerah

Pembangunan menurut Patarai (2016), merupakan perubahan kondisi pada arah yang lebih baik melalui upaya yang terencana. Pada perubahan pembangunan tersebut sejatinya mencakup perubahan pada seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat diartikan sebagai upaya perubahan kondisi seluruh sistem sosial yang lebih baik melalui upaya yang terencana. Lebih rinci, Paratai (2016) menjelaskan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Definisi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdefinisi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diperoleh sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang berlangsung. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Transfer dan DBH

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya adalah pendapatan transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. DBH sumber daya alam diantaranya merupakan kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan.

DBH pada dasarnya merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai pendapatan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota.

Untuk Provinsi Aceh dan Papua Barat, selain mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15,5% dan DBH SDA Gas Bumi sebesar 30,5%, juga mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagai pelaksanaan Otonomi Khusus yang masing-masing sebesar 55% dan 40% sebagai hak untuk mendanai peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

3. Metodologi Penelitian

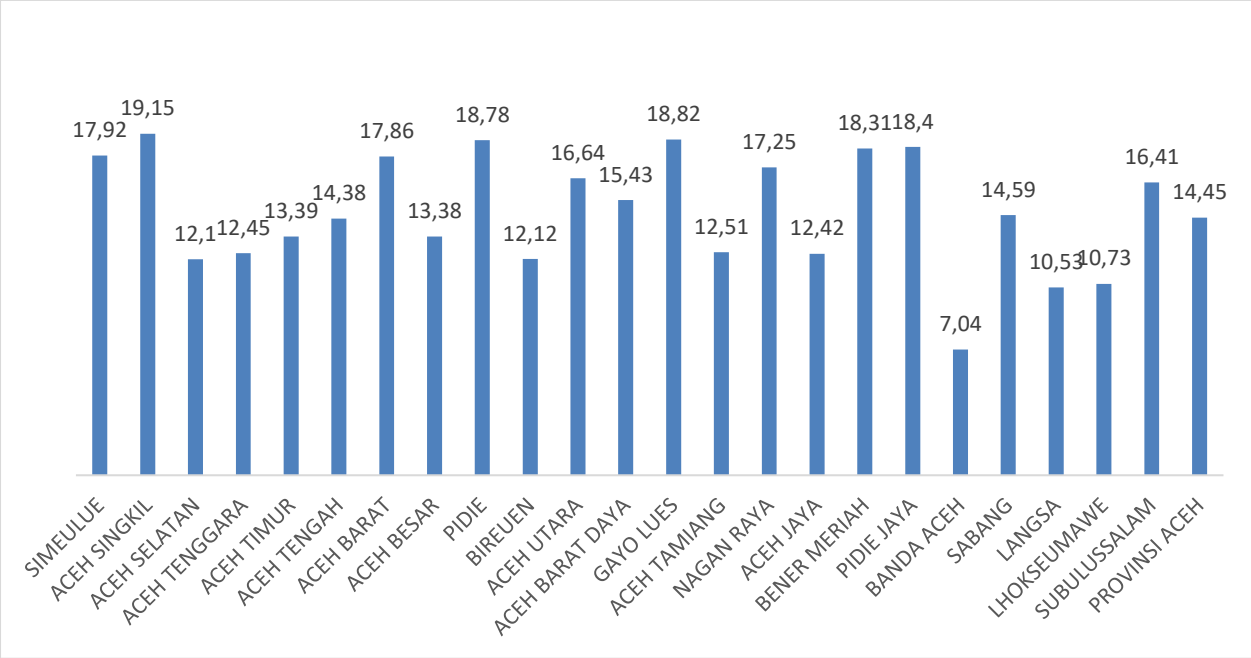
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menjelaskan peran sumberdaya alam dalam pembangunan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Aceh dengan menggunakan analisis deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahunan untuk menganalisis variabel-variabel penelitian yaitu DBH SDA, PDRB, PAD, dan presentase jumlah penduduk miskin periode 2018-2022 yang meliputi Provinsi Aceh dan lainnya di Pulau Sumatra. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, *World Bank*, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan dan Perekonomian di Provinsi Aceh

Kemiskinan menjadi permasalahan pokok utama dalam pembangunan perekonomian Aceh. Penduduk miskin di Provinsi Aceh tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota dengan berbagai faktor termasuk karakteristik dan pola penyebaran kemiskinan tersebut. Secara umum, dapat disimpulkan kemiskinan diseluruh kabupaten dan kota di provinsi aceh masih berada diatas tingkat kemiskinan nasional tahun 2023 yang sebesar 9,36 persen. Kemiskinan tertinggi di Aceh

terdapat pada Kabupaten Aceh Singkil yaitu sebesar 19,15 persen, Kabupaten Gayo Luwes sebesar 18.82 persen, dan Kabupaten Pidie sebesar 18.78 persen (Gambar 3). Ketiga kabupaten tersebut, merupakan kabupaten dengan dominan pendapatan sektor pertanian, sementara sektor pertambangan menyumbang kurang dari 5 persen terhadap PDRBnya.

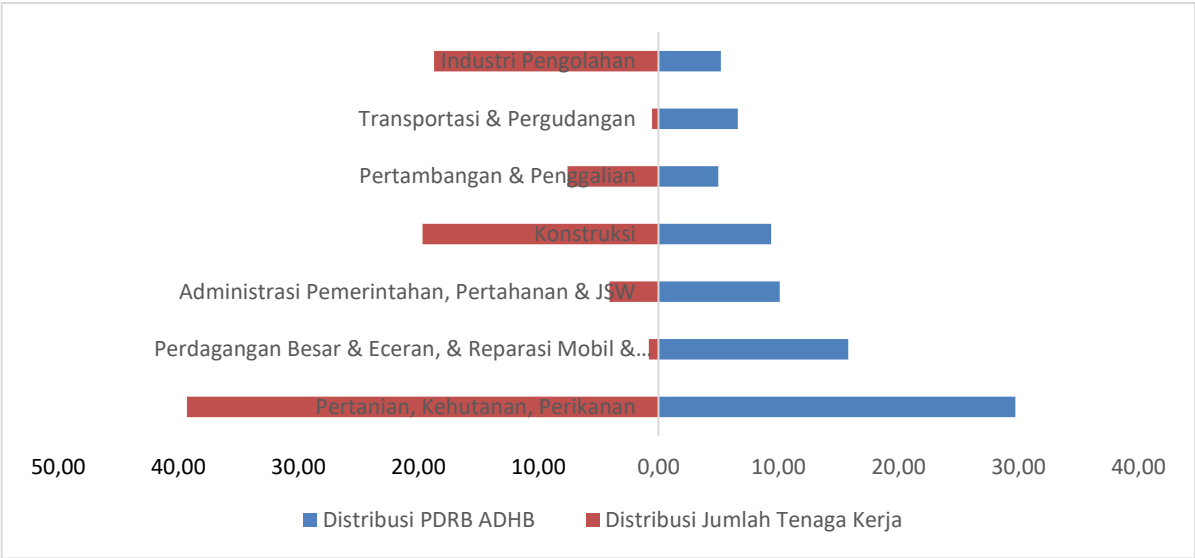


Gambar 3. Presentase Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2023b

Kemiskinan yang terjadi di provinsi Aceh tidak terlepas dari regulasi pemerintah dan pusat dalam mengelola sumber daya alam dan lainnya yang terkandung dalam wilayah tersebut. Adapun kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh disebabkan oleh berbagai faktor pendorong. Kuncoro (2006) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menentukan kemiskinan antara lain; perbedaan ketersediaan sumber daya alam; kualitas penduduk dengan tingkat pendidikan yang ditempuh; dan aksesibilitas dalam permodalan.

1. Potensi sumberdaya alam provinsi aceh terdiri berbagai sektor seperti bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kehutanan, pertambangan hingga penggalian minyak dan gas bumi. Meski sektor pertanian merupakan kontribusi terbesar dalam perekonomian di Aceh, sektor tersebut sejatinya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara agregat dikarenakan rendahnya produktivitas yang dimiliki oleh hasil pertanian jika diproporsionalkan dengan jumlah lahan yang ada. Begitu juga di Kawasan kehutanan dan perikanan, dimana produksi sektor ini belum mampu berperan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Rendahnya produksi sektor perikanan selain diakibatkan oleh masih terbatasnya modal baik finansial dan peralatan tangkap yang masih tradisional untuk

mendapatkan hasil tangkapan atau budidaya yang melimpah, mayoritas nelayan di provinsi aceh merupakan nelayan tradisional yang hanya meneruskan usaha dari keluarganya. Adapun sumberdaya alam lainnya yaitu pertambangan dan penggalian selain belum mampu memiliki produktivitas yang tinggi, juga belum mampu menyerap jumlah tenaga dengan optimal. Sebagaimana yang terlidat pada Gambar 4 dibawah ini, distribusi tenaga kerja terbanyak diserap oleh sektor pertanian, konstruksi dan industri, yaitu masing-masing sebesar 39,29 persen, 19,64 persen dan 18,70 persen. Namun, meski tenaga kerja yang terserap pada sektor pertambanganan dan penggalian hanya 7,57 persen, komposisi terlihat proporsional denganbeasr kontribusi ektor tersebut terhadap PDRB provinsi Aceh tahun 2022



Gambar 4. Distribusi Tenaga Kerja dan PDRB ADHB Provinsi Aceh Tahun 2018
Sumber: World Bank, 2018; Badan Pusat Statistik Aceh 2018, diolah

2. Untuk mencapai kesejahteraan, pendidikan menjadi hal yang krusial bagi masyakat daerah. Pendidikan masyarakat pada dasarnya berpengaruh pada produktifitas dan kualitas pekerjaanya sehingga menyebabkan jumlah pendapatan masyakarat yang akan cenderung lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator dalam pembangunan manusia yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan. Tingkat pendidikan akan menentukan jenis pekerjaan yang dijalani sehingga dapat berpengaruh pada hasil yang diperoleh berupa upah/gaji sebagai penentu produktivitas, sehingga dapat meningkatkan keejahteraan melalui pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Kendati demikian, pendidikan di provinsi Aceh secara umum telah mencapai rata-rata lama pendidikan diatas rata-rata nasional yaitu 8,77. Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di provinsi Aceh mencapai target pendidikan wajib 9 tahun, dan hanya beberapa kabupaten seperti subulussalam, Aceh Timur dan Gayo Luwes yang mencapai 8 tahun. Dalam hal ini,

meski rata-rata lama sekolah masyarakat di Aceh sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional, angka tersebut belum memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh dibuktikan dengan tingkat kemiskinan Aceh yang masih diatas rata-rata nasional.

Tabel 1. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah
Subulussalam	8.32	Pidie jaya	9.58
Aceh timur	8.42	Simeulue	9.81
Gayo lues	8.47	Aceh barat	9.89
Aceh singkil	8.7	Aceh tengah	9.98
Aceh barat daya	8.74	Aceh tenggara	10.09
Aceh jaya	8.77	Bener meriah	10.12
Aceh utara	8.85	Aceh besar	10.36
Nagan raya	8.91	Lhokseumawe	11.2
Aceh selatan	8.96	Langsa	11.27
Pidie	9.03	Sabang	11.27
Aceh tamiang	9.24	Banda aceh	13.04
Bireuen	9.32	Provinsi aceh	9.55
		Indonesia	8,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, 2023c

3. Disamping potensi sumber daya alam dan tingkat pendidikan, salah satu faktor pendorong kemiskinan daerah yaitu akses permodalan. Akses permodalan termasuk dalam lingkaran kemiskinan yang timbul dari hubungan yang saling mempengaruhi antara kondisi rendahnya tingkat pendidikan, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan rendahnya kinerja pemerintah dalam mensinergikan kebijakannya untuk mempermudah masuknya aliran modal investasi yang masuk ke daerahnya. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat secara umum sangat menentukan bagaimana permodalan dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk melangsungkan suatu kegiatan ekonomi yang inovatif dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia. Sinergitas pemerintah juga sangat memudahkan dalam menciptakan iklim bisnis yang dapat menarik pemilik modal sehingga dapat meningkatkan investasi dan permodalan yang tersedia bagi pelaku usaha yang ada. Berdasarkan hal tersebut, meski tingkat pendidikan di provinsi aceh sudah diatas rata-rata nasional, sinergitas pemerintah belum dapat membuktikan akses modal dapat dicapai oleh masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dan membantu

mengurangi tingkat kemiskinan dibuktikan dari rendahnya PDRB provinsi Aceh dibandingkan dengan provinsi penghasil sumberdaya alam lainnya (Badan Pusat Statistik Aceh, 2024).

Selain itu, kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh juga tidak terlepas dari letak geografis dan dampak konflik yang berkepanjangan di masa lalu, tingkat pendidikan yang rendah serta keberadaan regulasi pemerintah yang belum mampu mengoptimalkan keberadaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Provinsi aceh memiliki posisi geografis sebagai provinsi paling terluar pulau sumatera, sehingga perannya hanya mampu menjadi daerah penyangga perekonomian bagi provinsi lainnya di pulau yang sama. Sementara itu, akibat konflik yang berkepanjangan yang sempat menerpa wilayah Aceh selama beberapa dekade menyebabkan perlambatan pembangunan baik pembangunan fisik perekonomian dan pembangunan non-fisik pada kualitas pendidikan dan SDM.

Peran sumber daya alam terhadap Pendapatan Provinsi Aceh

PNBP sektor Minerba pada dasarnya ditransfer melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah penghasil dimana industri pertambangan tersebut berada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sebagai sumber dalam pendapatan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, fluktuasi pendapatan yang berasal dari penjualan minerba secara langsung berdampak pada jumlah DBH yang diterima oleh daerah penghasil. DBH sektor Minerba berkontribusi pada Anggran Dana Desa melalui alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah DBH. Melalui Anggran Dana Desa tersebut, DBH mengalir ke desa-desa di daerah penghasil tambang yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah industry tersebut, yang merasakan dampak langsung dari kegiatan pertambangan.

PNBP SDA Minerba yang diterima provinsi dan kabupaten penghasil berdasarkan jumlah yang ditransfer mengikuti perhitungan yang didasarkan oeh jumlah PNBP yang disetor oleh perusahaan ke kas negara berupa royalty dan land rents sesuai dengan tarif (%) dan realisasi produksi dan penjualan (royalty) serta luas lahan yang digunakan (land rents). Secara umum, besaran transfer DBH SDA minerba oleh pemerintah pusat adalah 80%, dan dibagi lagi antara provinsi dan kabupaten penghasil, masing-masing sebesar 16% dan 64%. Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas bumi dibagi sebesar 15,5% dan 30,5% kepada pemerintah daerah. Khusus provinsi Aceh dan Papua Barat dalam rangka Ototnomi Khusus mendapatkan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 50% dan 40% yang diperuntukkan untuk pendidikan dan Kesehatan.

Dari segi penghasil pertambangan mineral dan batubara serta Migas, Aceh termasuk sebagai salah satu provinsi penghasil terbesar di Indonesia. Sebagai daerah pelaksana otonomi khusus, Aceh juga memiliki otonomi khusus dalam pengelolaan sektor migas dan pertambangan serta pada aspek keuangannya. Dengan demikian, Provinsi Aceh memiliki kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dari sektor pertambangan dan migas yang didukung dengan keistimewaan pelaksanaan otonomi khusus. Secara proporsi pula, dana otonomi khusus (Otsus) menempati porsi terbesar dari Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat.

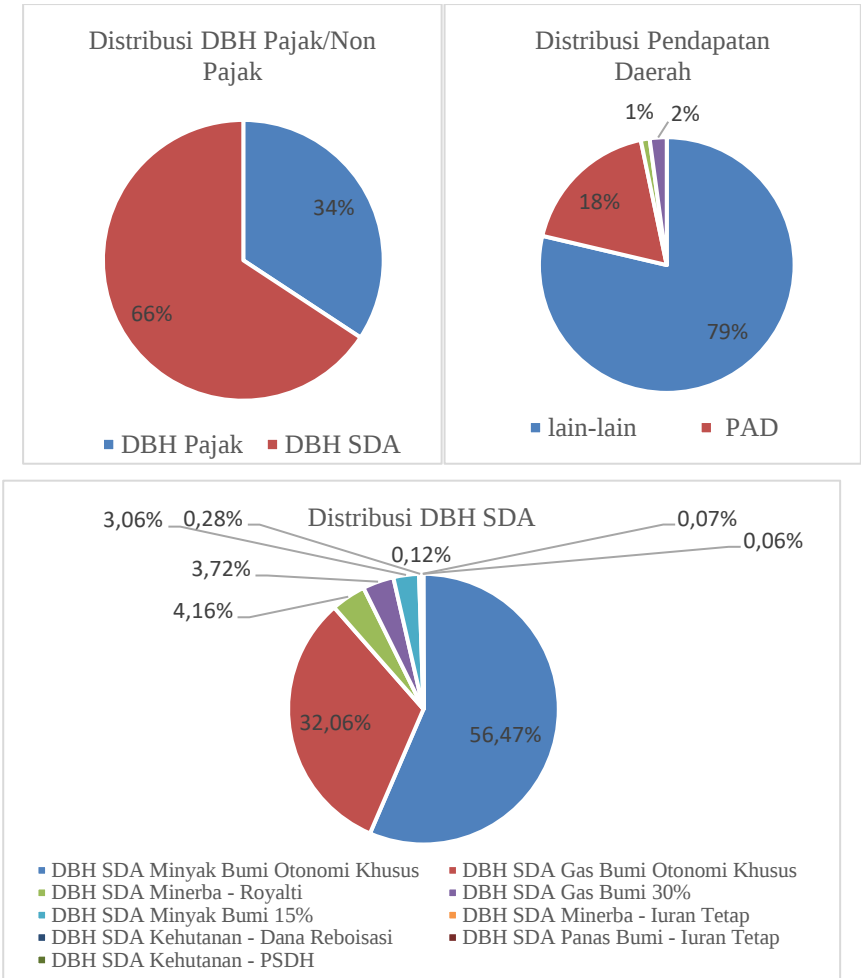
Berdasarkan Tabel 2. rata-rata penerimaan daerah Provinsi Aceh yang dalam periode 2018-2022 sebesar Rp. 14.456,49 Miliar, dimana rata-rata PAD yang dihasilkan dalam kurun waktu tersebut sebesar Rp. 2.610,42 Miliar, DBH Pajak dan SDA sebesar Rp. 472,59 Miliar, sementara penerimaan lainnya berupa Dana Transfer Pemerintah dalam bentuk DAU, DAK, Dana Otonomi dan lain-lain.

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Daerah Aceh Berdasarkan Sumber (Milyar Rupiah)

Tahun	Total Penerimaan Daerah	PAD	DBH	DBH SDA	Lainnya
2018	14.427,78	2.359,39	492,21	332,62	11.576,18
2019	15.752,80	2.698,91	639,75	514,02	12.414,14
2020	14.439,92	2.570,78	571,38	418,05	11.297,76
2021	13.948,39	2.505,89	231,73	31,42	11.210,77
2022	13.713,58	2.917,15	427,86	257,08	10.368,57
Rata-rata	14.456,49	2.610,42	472,59	310,64	11.373,48

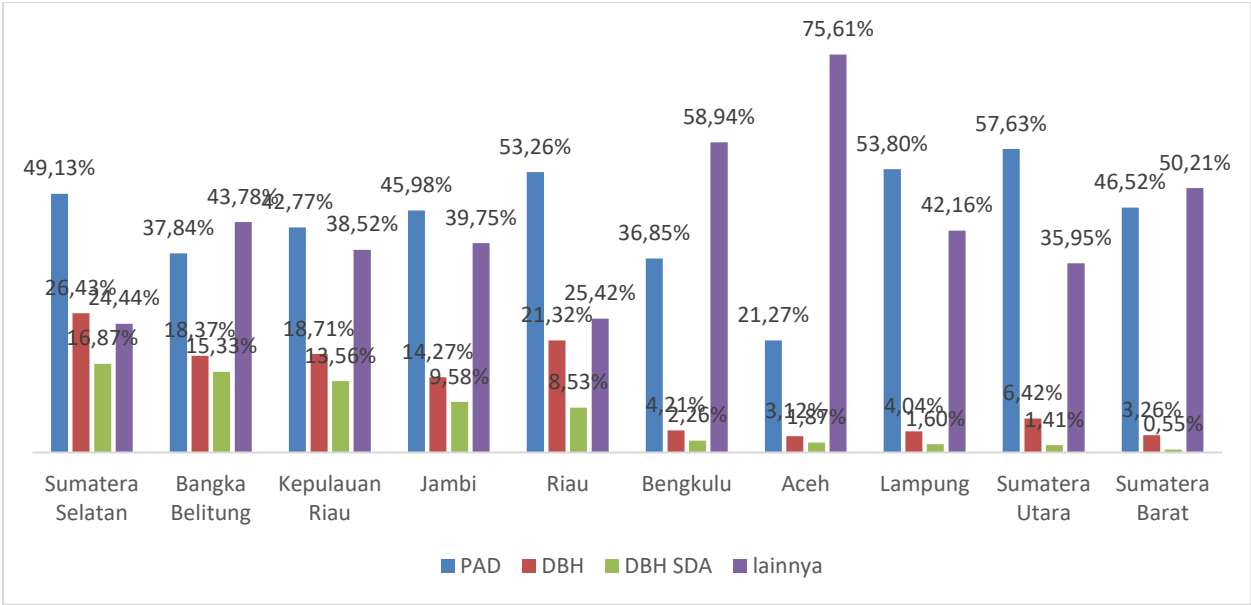
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018-2022, diolah

Sementara itu, Pendapatan DBH provinsi aceh didominasi oleh pendapatan dari sektor SDA, khususnya SDA Migas dan Pertambangan Minerba (Gambar 6). Rerata DBH SDA pada realisasi di tahun 2018 -2022 mencapai Rp 310,64 miliar atau 65,73 persen dari total DBH, sedangkan rerata DBH yang bersumber dari Pajak hanya sebesar Rp 161, 95 miliar atau 34,27 persen. Komposisi DBH SDA di Provinsi Aceh didominasi oleh SDA dari sektor Migas yang rerata realisasi di tahun 2018-2022 mencapai 95,31 persen terhadap total DBH SDA, sedangkan serata realisasi DBH SDA minerba tahun 2018-2022 sebesar 4,44 persen dari total DBH SDA. Dari penerimaan tersebut pula, DBH SDA secara keseluruhan masih ditopang oleh DBH Otsus Migas yang mencapai 88,53 persen. Secara keseluruhan, DBH SDA hanya mampu berperan sebanyak 2,15% terhadap total penerimaan provinsi Aceh.



Gambar 5. Rata-rata Distribusi Penerimaan Provinsi Aceh Tahun 2018-2022
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018-2022, diolah

Sebagai pembanding, penerimaan DBH baik Pajak maupun SDA provinsi Aceh masih jauh bila dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya di Sumatera. Jumlah PAD yang dihasilkan merupakan yang terkecil dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebesar 21,27 persen, sementara dana transfer lainnya mencapai 75,61 persen, terbesar di pulau sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di provinsi Aceh turut disebabkan oleh rendahnya kemandirian provinsi dalam meningkatkan PAD yang dihasilkan dan tingginya ketergantungan pemerintah dalam menjalankan fungsinya terhadap Dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Otsus.



Gambar 6. Distribusi Penerimaan Daerah Berdasarkan Provinsi di Sumatera Tahun 2022
Sumber: Kementerian Keuangan, 2018-2022, diolah

Peran Sumber daya alam terhadap Kemiskinan dan Pembangunan Provinsi Aceh

Potensi sumber daya alam provinsi aceh mestinya cukup besar untuk berkontribusi pada pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Penyelenggaran fungsi pemerintahan daerah dalam konteks otonomi akan terlaksana dengan optimal apabila diikuti dengan pengelolaan peningkatan penerimaan dan pembelajaan yang tepat sasaran. Selain bersumber dari dana Otsus, pemerintah Aceh mendapatkan pendapatan dari DBH SDA.

Penentuan dan pembaguan DBH SDA yang diterima oleh provinsi Aceh sesuai dengan wewenang pemerintah pusat dari penerimaan yang berhak atas DBH tersebut hingga jumlah nominal yang akan diterima sesuai dengan produksi yang dihasilkan kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Selanjutnya dana tersebut dialokasikan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/kota yang dapat digunakan sesuai fungsi pembangunan meliputi pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, ekonomi, perlindungan sosial, pariwisata dan kultural serta lingkungan hidup.

Akan tetapi, jika melihat angka kemiskinan dan pembangunan daerah, Provinsi Aceh masih tertinggal jauh dari provinsi lainnya di pulau sumatera yang luas wilayahnya lebih kecil. Karakteristik kemiskinan tertinggi di Aceh umumnya berada pada kabupaten pemekaran dengan di Kawasan pedesaan yang mayoritas pekerjaan utamanya adalah bertani.

Upaya pembangunan Pemerintah aceh secara umum dapat dilihat dari bagaimana anggaran pembangunan dan belanja provinsi aceh (APBA) dan 23 kabupaten/kota di Aceh (APBK) tersalurkan. Namun, keberadaan anggaran tersebut sejatinya belum proporsional dengan fungsinya

(Bappeda Aceh, 2015). Perbedaan komposisi APBA dan APBK yang dimiliki oleh masing-masing daerah menyebabkan kesenjangan fungsi anggaran secara umum yang akhirnya akan berdampak terhadap efektifitas pencapaian tujuan pembangunan dan perbedaan prioritas pengembangan fungsi anggaran antara provinsi dan kabupaten.

Beberapa hal menggambarkan bahwa dalam realisasinya koordinasi dan sinergitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan provinsi aceh yang disalurkan melalui anggaran daerah masih terlalu lemah sehingga belum memberikan dampak keberhasilan program yang optimal. Penetapan program pembangunan pemerintah layaknya memperhatikan relevansi kondisi kemiskinan dan karakteristik masyarakat di kabupaten/kota. Dengan demikian, dengan adanya ketidak proporsionalan jumlah anggaran yang diterima oleh tiap kabupaten tidak perlu memaksakan program dengan anggaran yang besar.

Berdasarkan laporan kajian tersebut, Belum efektifnya fungsi anggaran terhadap upaya penanggulangan kemiskinan turut dipengaruhi oleh miminnya kualitas perencanaan dan penganggaran program kegiatan kemiskinan yang dilihat dari lemahnya komitmen dan koordinasi serta pengawasan program pengentasan kemiskinan di aceh (Bappeda Aceh, 2015). Adapun tiga permasalahan mendasar yang mengakibatkan tujuan pembangunan pertanian dalam upaya pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil yang diharapkan diantaranya; program yang dijalankan lebih bersifat politis dibandingkan aspek strategis dan ekonomis; penilaian keberhasilan program pembangunan yang lebih ditekankan pada penyerapan anggaran serta lemahnya sinergi dan ego sektoral antar seluruh stakeholder. Adapun secara umum, berdasarkan kajian yang dilaporkan, berbagai program dan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat miskin secara umum dinilai telah efektif, sementara bantuan yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha cenderung tidak efektif. Jika program yang dibentuk tidak dikaji dan dievaluasi kembali, catatan tersebut mengindikasikan bahwa fiskal pemerintah aceh dalam upaya penanggulangan kemiskinan akan terlalu banyak dibebankan pada program yang bersifat jangka pendek dibandingkan program yang dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat meningkatkan kesejahteraannya dalam jangka panjang.

5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan

Kemiskinan menjadi masalah pokok utama perlambatan pembangunan daerah di provinsi Aceh. Beberapa penelitian menungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara sumber daya alam terhadap penerimaan daerah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meski faktor

kemiskinan seperti rata-rata lama sekolah provinsi Aceh yang telah melampaui rata-rata nasional, tingkat pendapatan dari hasil SDA dan akses permodalan bagi masyarakat dinilai masih menjadi faktor rendahnya pendapatan dan tingginya kemiskinan di provinsi tersebut. Sementara itu, faktor penyebab lemahnya peran SDA dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan dapat dinilai melalui DBH SDA provinsi tersebut yang masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Rerata DBH SDA pada realisasi di tahun 2018 -2022 mencapai Rp 310,64 miliar atau 65,73 persen dari total DBH. Dari penerimaan tersebut pula, DBH SDA secara keseluruhan masih ditopang oleh DBH Otsus Migas yang mencapai 88,53 persen. Secara keseluruhan, DBH SDA hanya mampu berperan sebanyak 2,15%.

Implikasi Kebijakan

Peranan SDA terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tidak hanya dihadapkan oleh permasalahan pendapatan yang belum optimal, tetapi juga oleh karena peranan pemerintah yang belum dapat mengoptimalkan perencanaan penganggaran yang tepat sasaran, efektif dan efisien serta bersinergi. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan untuk dapat membangun kapasitas pemerintahan yang dapat melaksanakan penganggaran dan perencanaan pembangunan untuk dapat menggali dan mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya alam sebagai pendapatan daerah yang berkelanjutan serta melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln, (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (2018-2022). Kontribusi PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha
- Badan Pusat Statistik (2018-2022). Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah
- Badan Pusat Statistik (2018). Distribusi PDRB ADHB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha
- Badan Pusat Statistik (2023a). Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi
- Badan Pusat Statistik (2023b). Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota
- Badan Pusat Statistik (2023c). Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2023
- Bappeda Aceh. (2015). Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh.
https://bappeda.acehprov.go.id/media/2022.08/laporan_final_kemiskinan_aceh_final1.pdf

- Bargawa, W. S. and Wibowo, A. (2012). “Kontribusi pendapatan regional hijau dari industri pertambangan mineral terhadap pendapatan regional”. *JIK TekMin* 23: 358-367. eprints.upnyk.ac.id. (in Indonesia).
- Farida, A., Arifuddin, M. H., Rahimi, N., & Kamarni, N. (2022). Pengaruh pembangunan desa terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 191-205. doi: 10.33059/jseb.v13i2.5253.
- Goorha, P. (2006). The Political Economy of The Resource Curse in Russia. *Demokratizatsiya* 14 (4), 601–611.
- Gylfason, T., Zoega, G. (2006). Natural Resources and Economic Growth: The role of investment. *World Econ.* 29, 1091–1115. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00807.x>.
- Ji, K., Magnus, J.R., Wang, W., (2014). Natural Resources, Institutional Quality, and Economic growth in China. *Environ. Resource. Econ.* 57, 323–343. <https://doi.org/10.1007/s10640-013-9673-8>.
- Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Unimal*, 01, 58–64.
- Kementrian Keuangan. (2018-2022). Portal Data TKDD. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mokorowu, L. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, volume 21 (04). DOI: doi.org/10.35794/jpekd.32839.21.4.2020.
- OECD, 2011. The Economic Significance of Natural Resources: Key Points for Reformers in Eastern Europe, Caucasus, and Central Asia.
- Patarai, Muhammad Idris. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)*. Cetakan Pertama, 1 (-). DE LA MACCA, Makassar. ISBN 978-602-263-109-5 <http://eprints.ipdn.ac.id/5866/>
- Peraturan Pemerintah. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- S. Singh, G. Deep Sharma, M. Radulescu et al. (2023). Do natural resources impact economic growth: An investigation of P5 + 1 countries under sustainable management, *Geoscience Frontiers*, [://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101595](https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101595)
- Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77-92.
- Suwadi, W., (2014), *Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, Cipta Selecta Ilmu Ekonomi, Ponorogo.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development* (11th Ed.). Pearson.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Undang- Undang*. Indonesia: Pemerintah Pusat.

Varicela, Nesda. (2018). *Perbandingan peran pendapatan asli daerah sektor pertambangan dan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.(Skripsi Thesis Universitas Bangka Belitung) <http://repository.ubb.ac.id/3299/>.

World Bank (2018). Indonesia Database for Policy and Economic Research.